

## ABSTRAK

*Illegal fishing* adalah kejahatan lintas negara atau *transnational crime* yang dikecam oleh berbagai negara dibelahan dunia karena dampaknya yang besar. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengedepankan diplomasi maritim yang bertujuan mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia atau negara maritim. Dalam rangka memberantas *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia lebih menekan pada hubungan kerjasama bilateral dan regional. Kerjasama bilateral dan regional yang dilakukan pemerintah Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo ini diharapkan mampu mewujudkan Indonesia bebas dari kegiatan *illegal fishing* yang merugikan berbagai aspek. Penerapan kesepakatan dalam kerjasama ini mengalami kendala sehingga menghambat realisasi kesepakatan-kesepakatan di negara-negara pantai termasuk Indonesia. Banyak negara-negara anggota kecewa atas penerapan kesepakatan yang terhambat tersebut.

Kata kunci: *Illegal Fishing*, Kebijakan Luar Negeri, Kerjasama Bilateral, Kerjasama Regional.

## **INDONESIA'S FOREIGN POLICY IN THE MARITIME FIELD: EFFORT TO COMBAT ILLEGAL FISHING IN THE ERA OF JOKO WIDODO**

Illegal fishing is a transnational crime which has been condemned by many countries parts of the world because of that huge impact. In the administration of President Joko Widodo, Indonesia promote maritime diplomacy aimed at realizing the vision of making Indonesia the world's maritime shaft or a maritime nation. In order to combat illegal fishing which occurred in Indonesian waters, Indonesia's foreign policy is more emphasize on bilateral relations and regional cooperation. Bilateral and regional cooperation by the Indonesian government during the reign of Joko Widodo is expected to make Indonesia free from illegal fishing activities are detrimental to the various aspects. The implementation of the cooperation agreement is constrained, thus impeding the realization of various agreements in the coastal countries, including Indonesia. Many member states were disappointed over delays in the implementation of the agreement.

**Keywords:** **Illegal Fishing, Foreign Policy, Bilateral Cooperation, Regional Cooperation.**